

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI PLAT  
NOMOR KENDARAAN PALSU**  
(Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar  
Lampung)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan  
memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DANI ANDREAN RUSMANA**

**NPM: 1321030093**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1439 H /2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHDAP JUAL  
BELI PLAT  
NOMOR KENDARAAN PALSU**  
(Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar  
Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan  
memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Dosen Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Dosen Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

**1439 H /2018 M**

## ABSTRAK

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus digunakan pada setiap kendaraan. Menurut Undang-Undang lalu lintas, pihak yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian dari bagian SAMSAT. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pencarian.

Pelaksanaan akad dalam proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung antara kedua belah pihak banyak menggunakan “bahasa pasar” atau bahasa non formal tetap mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. Para pihak yang melaksanakan akad sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam, mereka sudah masuk dalam katagori baligh dan isisi usia, secara akejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses jual beli.

Objek berupa plat nomor diperbolehkan dalam hukum Islam karena merupakan barang yang bukan najis, tidak haram jenisnya dan bisa diperjual belikan. Dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan berdasarkan tinjauan hukum Islam plat nomor yang sesuai dengan STNK asli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung azas manfaat dan kemaslahatan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan palsu, yang akan menjadi objek kajiannya ialah plat nomor.

Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendepkripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendepkripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan mengena jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan koding.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan adanya stnk yang asli sesuai dengan nomor kendaraan bermotor dan menurut hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN  
PALSU (Study Kasus di Kelurahan  
Penengahan Kota Bandar Lampung)**

**Nama : DANI ANDREAN RUSMANA**

**NPM : 1321030093**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. M. Rusli, M. Ag**

**Drs. H. A. Jalaluddin, S.H., M.M**

**NIP: 195902151986031004**

**NIP : 195703051978031001**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.,**

**NIP. 19720826 200312 1002**





## PENGESAHAN

## TIM MUNAQASYAH

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag



**Dekan Fakultas Syari'ah  
ULN Raden Intan Lampung**

**Er. A. Amsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002



## MOTTO

ثُمَّ فَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ مِرْأُولِي الرُّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرُّسُولِ إِلَهُ إِلَى فَرْدُهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعِ  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرُ ذَلِكَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>1</sup> (Q.S. An-Nisa ; 59)



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2015), h.84.

## PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Rusmana dan Ibunda Maimunah terimakasih atas doa tulus dan kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga, serta kerja keras demi keberhasilan anak-anak nya, agar kelak kami menjadi orang yang berguna di masa depan.
2. Saudara-saudaraku terkasih, Adik Yogi Candra Afari, Muhamad Reza Saputra, Restu Saputra Rusmana, yang selalu memberikan dorongan motivasi serta semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 1 Juli 1992, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Rusmana dan Ibu Maimunah.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Sekolah Dasar Negeri 5 Tugu Sari dan lulus pada tahun 2002
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumber Jaya dan lulus pada tahun 2007
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumber Jaya dan lulus pada tahun 2010



## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah AWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dibidang Hukum Islam pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, pembawa risalah agama Islam yang lurus, penyempurna agama Ibrahim, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan yang penuh kemaksiatan dan kezaliman menuju zaman yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan.

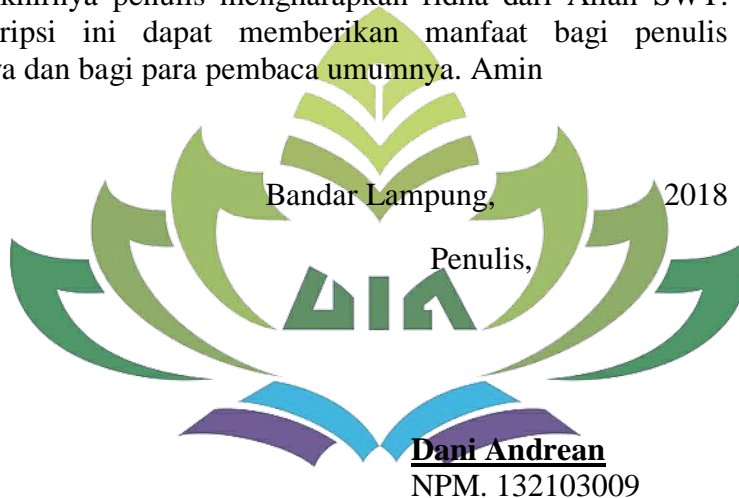
Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. dan Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bayak ilmu dan masukan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Lurah Penengahan Ibu Susia Awati S.H. yang telah membatu memberikan data lapangan yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.



5. Seluruh pegawai, staf kantor Kelurahan Penengahan yang bertugas, telah ikut membantu dan mengarahkan dalam penelitian lapangan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta para staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menimba Ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Muamalah A angkatan 2013.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Maya Armelia, NQS (noob quality squad), PISS (paguyuban scoter independen sumberjaya).
9. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT. Agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II TEORI DALAM JUAL BELI**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Khiyar Dalam Jual Beli .....	36
5. Macam-macam Jual Beli .....	39
6. Jual Beli Yang Dilarang Islam .....	43
B. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	53
1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	53
2. Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	55
3. Daftar Plat Nomor Kendaraan Bermotor .....	56

### **BAB III GAMBARAN PRAKTEK JUAL BELI PLAT NOMOR PALSU**

A. Sejarah Singkat Kelurahan Penengahan.....	59
B. Potensi Dasar Kelurahan Penengahan.....	59
C. Pertahanan .....	60



D. Kependudukan.....	61
E. Bidang Pemerintahan .....	61
F. Gambaran Umum Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	62
1. Pengertian Plat Nomor .....	62
2. Macam-macam Warna Plat Nomor .....	62
3. Plat Nomor Sejenis TNKB .....	62
4. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	63
G. Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Bandar Lampung.....	63

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor .....	72

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman didalam membahas judul skripsi ini, maka secara singkat akan diuraikan maksud dari skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu (Studi Kasus di Bandar Lampung)”**. Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *“al-baiu”* yang berarti tukar menukar suatu barang.<sup>3</sup> Adapun menurut isilah jual beli di artikan tukar menukar suatu barang dengan barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan kamus hukum bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak

---

<sup>1</sup>W.J.S.Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), h. 1078.

<sup>2</sup>Amir Syaripuddin, *Usul Fiqih, Jilid 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6.

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997, h. 56

<sup>4</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.



yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tentu dan pihak yang lain mengikat untuk membayar harganya.<sup>5</sup>

4. Plat nomor adalah tanda yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian kendaraan bermotor berupa plat yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.<sup>6</sup>
5. Plat nomor palsu adalah plat nomor yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh SAMSAT, berbeda dalam segi bahan dan ukuran.<sup>7</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, yang penulis maksudkan judul skripsi ini ialah tinjauan hukum Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di daerah Bandar Lampung. Skripsi ini mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu yang terjadi di wilayah bandar lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif, mengingat perkembangan jual beli yang beraneka ragam maka persoalan muamalah pun berkembang pada zaman sekarang ini, lebih spesifik kepada penjualan plat nomor kendaraan bermotor palsu atau bukan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Penggunaan plat motor pada kendaraan bermotor yang semestinya adalah yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian seperti yang tertera pada Peraturan Kepala Kepolisian

---

<sup>5</sup>C. T. Simorangki, dkk, *Kamus Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2000), h. 77.

<sup>6</sup>Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 Ayat 10

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Bripka Erik Triwisbowo, kepala bagian pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, pada tanggal 8 Oktober 2017

Negara Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 Ayat 10.

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penelitian terjangkau, dan adanya refrensi yang mendukung sehingga mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia seperti di dalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan.

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Para pihak dalam bertransaksi jual beli akan terbentuk suatu akad, salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya, obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, seperti jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan

---

<sup>8</sup>Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponogoro, 1983), h. 13

jual beli lainnya yang dapat mengakibatkan penyesalan pada pihak lain. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemadharatan dan tipu daya.<sup>9</sup>

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. (Q.S. An-Nisa':29)”<sup>10</sup>

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang rumit, jika di laksanakan tanpa aturan-aturan

<sup>9</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2000), h. 65.



dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam melakukan jual beli juga ada etikanya hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS, Asyura' ayat 183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asyura’:183)”<sup>12</sup>

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengadilan atau pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>13</sup>

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang

<sup>11</sup>hamzah Yaquh, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* (Bandung: CV.Diponogoro, 1983), h. 13.

<sup>12</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.11.

<sup>13</sup>Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 64. h. 49

telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Pengguna tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat alumunium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf) dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 05-10 berarti berlaku hingga bulan Mei tahun 2010).<sup>14</sup> Seperti yang tercantum dalam pasal 68 Undang-undang R.I. nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal tersebut disebutkan “bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.<sup>15</sup>

Sedangkan, situasi dilapangan yaitu banyak penjual plat motor modifikasi atau palsu seperti di Jl. Teku Umar kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas adalah tentang obyek yang diperjualkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu yang ada di pinggir-pinggir jalan Teku Umar Kelurahan Penengahan Bandar Lampung lebih menitik beratkan kepada memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia. Sedangkan, dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan dan dilarang oleh pihak kepolisian.

Melihat fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam**

---

<sup>14</sup><http://Www.Zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-KendaraanDi.Html?M=1> (20 Maret 2017)

<sup>15</sup>Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Op.Cit*, h. 51.

## **Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsudi Bandar Lampung”**

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

##### **a. Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli plat kendaraan bermotor palsu di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagai mana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Bandar Lampung.

##### **b. Tujuan Khusus**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan



ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Kegunaan secara praktis, untung menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum islam dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.<sup>16</sup> Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses.<sup>17</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik penjualan plat nomor kendaraan palsu.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan

---

<sup>16</sup>Lexy J. Melong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3

<sup>17</sup>Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 3

menggunakan berbagai literature yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>18</sup> Penelitian yang penulis gagas ditunjukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum islam yang terfokus kepada masalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari hukum islam di Bandar Lampung.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data skunder:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>19</sup> Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan penjual plat sekaligus juga seorang polisi dan pembeli.

---

<sup>18</sup>Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63

<sup>19</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.<sup>20</sup> Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan.

#### 4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, mungkin manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang penjual, 1 orang polisi dan 3 orang pembeli di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung.

b. Sample

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau sampling yang purposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Penelitian akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Jadi, maksud dari metode purposive sampling yaitu dalam menetapkan sampel disarankan pada

---

<sup>20</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zaunal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1991 h. 104.



pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 7 toko yang melaksanakan jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung, 1 pihak kepolisian dari samsat status sebagai ketua bidang pembuatan plat, Pembeli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung 3 orang sebagai informan dalam penulisan penelitian dari skripsi ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah memilih, mengubah, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan bermotor.

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>23</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 105.

<sup>23</sup>*Ibid*, h.97.

penjual plat nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya akan dilihat dari persepektif hukum islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>24</sup> Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung dari data observasi dan wawancara.

## 6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul tinjauan hukum Islan terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor.

---

<sup>24</sup>*Ibid*,h. 106.

b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban daripada responden kedalam kategori-kategori.<sup>25</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>26</sup> Metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapat suatu kesimpulan akhir.

Setelah selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara deduktif.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.115.

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000),h.49





## BAB II

### TEORI DALAM JUAL BELI

#### A. Jual Beli Menurut Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*’ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba’i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah SWT<sup>1</sup>

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : ...mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>2</sup>

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli, sekalipun memiliki substansi dan tujuan yang sama antara lain sebagai berikut :

a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu :

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 438.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَنَحْوَهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلَعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوَهَا  
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>٣</sup>

Artinya : “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

وَهُوَ مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ  
مَخْصُوصٍ.<sup>٤</sup>

Artinya : “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua

macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا  
مُتَعَةٍ لَذَّةٍ.<sup>٥</sup>

<sup>3</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 135

Artinya : “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>6</sup>

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا  
مُتَعَةٍ لَذَّةٍ أَوْ مُكَايَسَةٍ أَحَدُهُمَا ضَيْعَةٌ غَيْرُ  
ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ .<sup>7</sup>

Artinya : “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak

<sup>5</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 69

<sup>7</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, h. 372

ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>8</sup>

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu: "pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan".<sup>9</sup>

- d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا .<sup>10</sup>

Artinya : "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."

- e. Menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70

<sup>9</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, ( Bandung: Alma'arif, 1987) h. 559

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25



yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang dan pihak lain sebagai penerima benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya yaitu:

### a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan jual beli, di antaranya:

#### 1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>12</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya Tafsir Al-Misbah yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 48

<sup>13</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Pelanggaran riba ini bersumber dari beberapa ayat didalam Al-Qur'an. Beberapa studi telah dilakukan rasionalitas dibalik pelanggaran riba. Salah satu yang paling komprehensif adalah karya Umer Chapra dalam bukunya "The Future Of Economics" atau karya Hayek dan Vogel.<sup>14</sup> Riba adalah perbuatan yang tidak baik dan hina.<sup>15</sup> Menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut adalah dosa besar dan penyakit yang berbahaya. Kekafiranpun datang dengan cepat kepada yang menerima riba<sup>16</sup>.

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."  
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Jurnal Al'Adalah Jurnal Hukum dan Kebudayaan Islam (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Al'Adalah No.1-2 Edisi Januari-Agustus 2013), H.90

<sup>15</sup> Haji Abdul Maluk Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz' 1-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65

<sup>16</sup> Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 47

2) Q.S. An-Nisaa' (4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ  
بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 29) <sup>18</sup>

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. <sup>19</sup>

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, *Op.Cit.*, h. 413

bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.<sup>20</sup> Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى  
عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ  
خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيُّ  
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ  
يَدِهِ . (رواه البخاري ومسلم)<sup>21</sup>

Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan 'Isa, dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma'dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s.

<sup>20</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc.Cit.*, h. 1

<sup>21</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1944, h. 788

makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.”  
(H.R. Bukhari Muslim)

## 2) Hadits Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار  
وصححه الحاكم)<sup>22</sup>

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap *shahih* menurut Hakim)

### c. Ijma'

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>23</sup> Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan

<sup>22</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

<sup>23</sup> Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75



transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>24</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah,<sup>25</sup> yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf,

---

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46

<sup>25</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144

beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>26</sup>

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya.

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>28</sup> Adapun rukun jual beli adalah:

##### 1) Penjual

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 90

<sup>28</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300-301

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) Sighat

Sighat berbentuk ijab dan qabul dengan suatu ungkapan seperti 'juallah kepadaku dengan harga sekian' kemudian penjual mengatakan, 'aku jual kepadamu' atau dengan mengatakan, 'jual kepadaku baju', missal, lalu memberikannya kepadanya.

5) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.<sup>29</sup>

Dengan demikian jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dikatakan sah.

a. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang

---

<sup>29</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1991), h. 40

subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain :

1. Dua pihak yang berakad atau الْعَقِيدَان, syaratnya yaitu :

a) *Baligh*

*Baligh* yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan). Ciri-ciri *baligh* yaitu :

- (1) *Ihtilam* yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2) *Haidh* yaitu keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3) Rambut yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (4) Umur yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.<sup>30</sup>

b) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

---

<sup>30</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 80

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ  
 اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 5)<sup>31</sup>

c) Dengan kehendak sendiri  
 Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 75

<sup>32</sup> Madani, *Op.Cit.*, h. 104



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu...” (Q.S. An-Nisaa (4) : 29)<sup>33</sup>

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.<sup>34</sup>

- d) Tidak pemboros atau tidak *mubadzir*  
Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 84

<sup>34</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 366

boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Swt. :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisaa (4) : 5) <sup>35</sup>

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros (*mubadzir*) hukumnya adalah tidak sah.

2. Objek akad atau مَوْقُودٌ عَلَيْهِ, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : <sup>36</sup>

a) Suci atau bersihnya barang

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 75

<sup>36</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: CV. Bina Iman, 1995), h. 539

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي  
حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ  
بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ  
الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ،  
وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ  
ذَلِكَ : قَاتِلِ اللَّهَ الْبَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ،  
لَمَّا حَرَّمَ هُ ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ . (رواه البخاري و

مسلم)<sup>37</sup>

Artinya : Meriwayatkan Qataibah,  
meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu  
Habib, dari 'Ato bin Abu Rabbah, dari Jابر  
bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah  
Saw. bersabda ketika Fathu Makkah:  
"Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah  
mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai,  
dan patung-patung (berhala)." Lalu ditanya:

<sup>37</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*,  
No. Hadits 2096, h. 841.

“Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, kesucian merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau babi atau anjing atau berhala karena objek tersebut pada dasarnya sudah dihukumi najis oleh Alquran.

b) Harus dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.<sup>38</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum

---

<sup>38</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 146

agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku dengan merujuk kepada hadits yang riwayat Jabir r.a., yang berbunyi :<sup>39</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا  
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،  
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ . (راوه  
البخاري و مسلم)<sup>40</sup>

Artinya : “Diceritakan Abdullah Bin Yusuf mengabarkan kepada Malik, dari Bin Syihab, dari Abu Bakar Bin Abdurrahman, dari Abi Mas’ud Bin Anshori r.a., bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun.” (H.R. Bukhari Muslim)

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 7

<sup>40</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2097, h. 841



- c) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki oleh orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

Al Wazir pernah berpendapat bahwa “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil”.<sup>41</sup>

- d) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*.

- e) Barang itu dapat diketahui

Syarat yang kelima ialah barang yang hendak diperjual belikan harus dapat diketahui oleh pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi Saw., melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup pemberi tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual

---

<sup>41</sup> Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, h. 367

belikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا  
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى  
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ  
حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا  
فِي يَعْمَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ  
بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري و مسلم)<sup>42</sup>

Artinya : Diceritakan Sulaiman bin Harbi, diceritakan Syu'bah dari Qathadah dari Sholih Abu Kholil dari Abdullah bin Harits disampaikan kepada Hakim bin Hizam r.a. berkata: Nabi Saw. bersabda: “Penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka jika keduanya benar jujur menerangkan/terbuka maka berkat jual beli keduanya, bila menyembunyikan dan dusta dihapus berkat jual beli keduanya.” (H.R. Bukhari Muslim)

---

<sup>42</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1951, h. 790

### 3. Sighat atau lafadz akad (ijab kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz*, terdapat beberapa syarat yang

perlu diperhatikan, antara lain :<sup>43</sup>

- a) Satu sama yang lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.<sup>44</sup>

### 4. *Khiyar* Dalam Jual Beli

*Khiyar* adalah yaitu jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.<sup>45</sup> *Khiyar* secara *syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-

---

<sup>43</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 282

<sup>44</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Op.Cit.*, h. 50

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

*Khiyar* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hadits Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا  
أَيُّوبُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ  
مَلَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا  
قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخاري  
ومسلم)<sup>46</sup>

Artinya : “Meriwayatkan Abu Nu'man, meriwayatkan Hamad bin Zaidin, meriwayatkan Ayyub dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: “dua pihak yang saling jual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (*Khiyar*) terhadap pihak lain, selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan *Khiyar*.” (H.R. Bukhari Muslim)

*Khiyar* ada tiga macam, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Khiyar majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih selama keduanya masih berada di tempat jual beli;

---

<sup>46</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 1981, hlm. 802

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm 286

- 2) *Khiyar syarat*, artinya *Khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak;
- 3) *Khiyar 'aib*, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tau, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.

Selain ketiga kategori *khiyar* tersebut, prof. Dr. Muhammad Thahir Mansori membagi *khiyar* ke dalam empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn*. *Khiyar al-ghabn* adalah hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan. *Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan ke dalam situasi berikut ini :<sup>48</sup>

- 1) *Tasriyah*

*Tasriyah* bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang tersebut berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

Menurut pandangan mayoritas ulama, tindakan *tasriyah* ini membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan.

- 2) *Tanajush*

*Tanajush* bermakna menawarkan harga yang tinggi suatu barang tanpa ada niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

- 3) *Ghabn Fahisy*

---

<sup>48</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm 107

*Ghabn fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan oleh pihak lain.

4) *Talaqqi Al-Rukban*

*Talaqqi al-rukban* merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>49</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk<sup>50</sup>, yaitu :

- a. Jual beli yang kelihatan, yaitu yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian diantara satu pihak.

---

<sup>49</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71

<sup>50</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 20



Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk,<sup>51</sup> yaitu:

- a. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.
- b. Jual beli yang bathil yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:
  - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada  
Menurut para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan  
Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkanya.
  - 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan  
Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.
  - 4) Jual beli barang najis  
Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamar, sebab benda-benda tersebut

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 128-129

tidak mengandung makna makna dalam arti hakiki menurut syara’.

5) Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.<sup>52</sup>

6) Jual beli *fasid*

Menurut ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-beli maka hukumnya batal. Seperti menjual-beliakan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama hanafiyah, antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- 3) Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual-

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h.130

<sup>53</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2009), h.125-126

belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak *khiyar* sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual-belian bersifat *majhul*.<sup>54</sup>

- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- 6) Jual beli *ajal*. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar. Apabila penjualan anggur itu produsen khamr.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang : “jika tunai harganya Rp. 10.000,- , dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.

---

<sup>54</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 136-138

- 9) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>55</sup>

## 6 Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.<sup>56</sup> Berkaitan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili<sup>57</sup> membagi :

- a. Jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

- 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- 2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

- 3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Op.Ci.*, h. 129

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 78

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 99

jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.<sup>58</sup>

4) Jual beli Fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).<sup>59</sup>

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual-belikan), antara lain:

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 100

<sup>59</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 150

(kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>60</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي  
الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)<sup>61</sup>

Artinya :Abdullah bin Mas'ud ra bahwasanya Nabi SAW,Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad).

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam<sup>62</sup>:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- b) Tidak diketahui harga dan barang,
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang,
- f) Menghargakan dua kali pada satu barang,
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- h) Jual beli *husna'*,
- i) Jual beli *munabadzah*,
- j) Dan Jual beli *mulasamah*.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 74

<sup>61</sup> Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'I Fadhlil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'I Kala'I Tahrir Mani Badlaihi WA Tahriru Bay'I Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h.3494

<sup>62</sup>Rachmat Syafe'I. *Op.Cit.*, h. 98



Sedangkan dalam ketidak tahuan akan zat barang atau harga adalah bentuk dari gharar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui. Sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Berikut pendapat para *fuqaha* antara lain<sup>63</sup>:

- a) Mazhab Sayafi'I, Hambali dan Dhahiri, melarang transaksi jual beli semacam ini baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar.
- b) Sedangkan mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur gharar tidak berpengaruh terhadap akad.
- c) Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga dan melarang yang melebihi dari tiga.

Dengan adanya pendapat para *fuqaha* mengenai ketidak tahuan akan zat barang atau harga termasuk gharar yang sedang karena hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

---

<sup>63</sup><http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html>  
diakses: 24 Febuari 2017

### 3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.<sup>64</sup>

### 4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

### 5) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'an)

Menurut Imam Syafi'i benda benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, *khamar*, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.<sup>65</sup> Hal ini sebagaimana sabda nabi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ  
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)<sup>66</sup>

Artinya : Dari Jabir RA, RAAsulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan jual

<sup>64</sup> Khumaedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 152

<sup>65</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya', Mesir. Tt, h.67

<sup>66</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muutoj*, Juz II, h. 2

beli arak, bangkai, babi dan berhala.  
(HR. Bukhori dan Muslim)

- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ (رواه البخارومسلم)<sup>67</sup>  
سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

Artinya : Sesungguhnya, Rasulullah SAW melarang jual-beli calon anak dari janin yang dikandung. (HR Bukhori Muslim)

- 7) Jual beli Muzabanah

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Oleh karena itu jual beli yang seperti itu dilarang. Hal ini sebagaimana sabda nabi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>67</sup> Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, h. 1514

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ يَبِيعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا،  
وَيَبِيعُ الزَّرِّيَّ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. (رواه  
البخاري و مسلم)<sup>68</sup>

Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : "Rasulullah Saw. melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon." (H.R. Bukhari Muslim)

#### 8) Jual beli Muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungnya).<sup>69</sup>

#### 9) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>70</sup>

#### 10) Jual beli Mulammasah

<sup>68</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2039, hlm. 820

<sup>69</sup> Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, h.79

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 143

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### 11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>71</sup>

#### c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab Kabul)

##### 1) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

##### 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h.144

untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>72</sup>

3) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.<sup>73</sup>

4) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, Karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

---

<sup>72</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 156

<sup>73</sup> Sayyid Sabid, *Op.Cit.*, h.79



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.و لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ  
(رواه البخاري ومسلم)<sup>74</sup>

Artinya : Rasulullah SAW bersabda :  
Janganlah seseorang menjual di atas  
jualan saudaranya. (HR. Bukhori  
Muslim)

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ  
بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : هُيِّنَا أَنْ  
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (رواه البخاري و  
مسلم)<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Ibid.,No. Hadist 2008, h. 812

<sup>75</sup>Ibid., No. Hadits 2029, hlm. 818

Artinya : Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu ‘Un dari Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim)

- 7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).<sup>76</sup>

## **B. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Nomor**

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Pengguta tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetatan tulisan dua baris. Baris

---

<sup>76</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 158

pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode atau seri akhir wilayah (huruf). Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 05-10 berarti berlaku hingga bulan Mei tahun 2010).

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetak “KORLANTAS POLRI” (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Pada pertengahan 2014 terjadi perubahan tampilan. Plat nomor kini sedikit diperpanjang dari ukuran semula (untuk roda empat). Selain itu, terdapat perubahan posisi lambang Polantas dan tulisan “Korlantas Polri”, yakni, lambang Polantas kini berada disudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan tulisan “Korlantas Polri” berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas.

Korps Lantas Mabes Polri terhitung mulai April 2011 mengganti desain plat nomor kendaraan. Ukurannya lebih panjang 5 centi meter daripada plat nomor sebelumnya. Perubahan ukuran plat dilakukan karena ada penambahan menjadi tiga huruf di belakang nomor (Contoh B 1099 GFW) sementara sebelumnya hanya dua huruf (Contoh B 1724 HK). Perubahan ini membuat angka dan huruf kepada plat nomor berdesakan, jarak antara nomor dan huruf pada plat lebih luas sehingga mudah terbaca.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada tampilan. Plat TNKB baru memiliki lis putih di sekeliling plat. Antara nomor TNKB dan masa berlaku TNKB, tidak diberi pembatas lis putih. Namun seperti

plat nomor lama, di plat ada dua baris yakni baris pertama yang menunjukkan kode wilayah kendaraan, nomor polisi dan kode seri akhir wilayah. Baris kedua menunjukkan masa berlaku plat nomor. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm. sementara ini, plat resmi yang lama masih berlaku (apalagi sejumlah Samsat di berbagai daerah sering memanfaatkan plat jenis lama untuk kendaraan yang plat nomornya diperpanjang setelah tahun 2011). Selain itu, pada spesifikasi teknis baru ini plat nomor menggunakan rupa huruf yang sama.

## **2. Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

1. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
2. Kendaraan bermotor umum berwarna dasar kuning dengan tulisan berwarna putih
3. Kendaraan bermotor milik pemerintah berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
4. Kendaraan bermotor korps diplomatik Negara asing berwarna dasar putih atau merah dengan tulisan berwarna hitam
5. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik Negara asing berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka Negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
6. Kendaraan bermotor dikawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor tidak boleh dioperasikan atau

dimutasikan kewilayah Indonesia lainnya)  
dengan warna dasar hijau dengan tulisan hitam

### 3. Daftar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

#### 1. Daftar Plat Nomor Kendaraan di Pulau Jawa

A = Banten-Serang-Merak

B = DKI Jakarta-Depok-Tangerang-Bekasi

D = Bandung

E = Cirebon

F = Bogor

G = Pekalongan

H = Semarang

L = Surabaya

M = Madura

N = Malang

P = Besuki

R = Banyumas

S = Bojonegoro

T = Karawang-Cikampek

AA = Kedu

AB = DI Yogyakarta-Magelang

AD = Surakarta

AE = Madiun



AG = Kediri

W = Sidoarjo (Jawa Timur)

Z = Sumedang (Jawa Barat)

## **2. Daftar Plat Nomor Kendaraan di Sumatra**

BA = Sumatra Barat

BB = Sumatra Utara

BD = Bengkulu

BE = Lampung

BG = Palembang

BH = Jambi

BK = Medan

BL = DI Aceh

BM = Riau

BP = Kepulauan Riau

BN = Bangka

## **3. Daftar Plat Nomor di Kalimantan**

DA = Kalimantan Selatan

KB = Kalimantan Barat

KT = Kalimantan Timur

KH = Kalimantan Tengah

## **4. Daftar Plat Nomor Kendaraan di Sulawesi**

DB = Minahasa





DD = Sulawesi Selatan

DM = Sulawesi Utara

DN = Sulawesi Tengah

DT = Sulawesi Tenggara

DL = Sangihe atau Talaud

#### **5. Daftar Plat Nomor Kendaraan di Maluku**

DE = Maluku Selatan

DG = Maluku Utara

DH = Maluku utara

#### **6. Daftar Plat Nomor Kendaraan di Bali**

DK = Bali

#### **7. Daftar Plat Nomor Kendaraan di NTB**

DR = Pulau Lombok-Kota Mataram-Kabupaten  
Lombok Barat-Kabupaten Lombok Timur-Kabupaten  
Lombok Tengah

EA = Pulau Sumbawa-Kabupaten Sumbawa Barat-  
Kabupaten Sumbawa-Kabupaten Dompu-Kota Bima

#### **8. Daftar Plat Nomor Kendaraan di NTT**

DH = Pulau Timor-Kota Kupang-Kabupaten Rote  
Ndao

EB = Flores-Sumba<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup><http://www.zonanesia.net/2015/04/daftar-kode-plat-nomor-kendaraan-di.html?m=1> (20 Mei 20017)

## **BAB III**

### **DATA LAPANGAN**

#### **A. Sejarah Kelurahan Penengahan**

Dahulu nama penengahan karena terletak ditengah-tengah antara Kota Tanjung Karang dengan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan. Pada awal pertumbuhannya Penengahan termasuk wilayah Negri Balau Jaga baya Lampung Selatan. Kira-kira tahun 1996 memisahkan diri dengan Jaga baya masuk wilayah kota praja Tanjung Karang-Teluk Betung. Tahun 1960 Penengahan dibagi menjadi Sidodadi, Surabaya, dan Penengahan sendiri yang dibawah pimpinan Kepala Desa Bapak Harjo Warsito.

Tahun 1980 Penengahan menjadi Kelurahan dibawah pimpinan Lurah Sardini Susanto dan pada waktu itu Kelurahan Penengahan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur, tahun 1982 Kelurahan Penengahan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat, yang dibawah pimpinan Lurah Bapak Tukiman.

#### **B. Potensi Dasar Kelurahan Penengahan**

##### **1. Umum**

##### **Luas dan Batas Wilayah**

##### **a. Luas Kelurahan : ± 24,5 Ha**

##### **Batas Wilayah**

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Suka Menanti

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Penengahan Raya
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya 1
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Penengahan Raya

## **2. Kondisi Geografis**

Memgenai keadaan iklim Kelurahan Penengahan termasuk beriklim sedang, perkiraan curah hujan lebih kurang  $\pm 2000-3000$  M atau dengan jenis tanah bersifat batu-batuan dengan suhu udara rata-rata  $21^{\circ}\text{C}-32^{\circ}\text{C}$ .

## **3. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)**

Jarak pemerintah Kelurahan Penengahan dengan pemerintah kecamatan berjarak 1 Km dengan menempuh waktu 5 menit dengan kendaraan.

Jarak pemerintahan Kelurahan Penengahan dengan pemerintahan Kota berjarak 5 Km dengan menempuh waktu 30 dengan kendaraan.

Jarak pemerintahan Kelurahan Penengahan dengan pemerintah Ibu Kota Provinsi berjarak 7 Km dengan menempuh waktu 1 jam 30 menit dengan kendaraan.

## **C. Pertanian**

Kondisi pertubahan di Kelurahan Penengahan pada umumnya tanah tersebut dahulu kala hanya dikuasai beberapa orang dilihat dari surat keteranga jual beli tanah. Sampai saat ini masih banyak warga yang menyewa tanah untuk tempat tinggal.

1. Tanah kas Kelurahan : -
2. Tanah bersertifikat : 632 Buah Tanah
3. Tanah yang belum bersertifikat : 200 buah tanah

#### **D. Kependudukan**

Bahwa penduduk Kelurahan Penengahan sudah cukup padat dan mayoritas suku pendatang dari daerah Jawa, pemeluk agama terbanyak adalah agama Islam. demikian pula angka kelahiran masih dianggap wajar dan berimbang dengan jumlah orang yang menikah, sedangkan jumlah penduduk yang datang banyak pegawai negeri sipil dan kariawan perusahaan swasta.

#### **E. Bidang Pemerintahan**

**Table 1**

**Keadaan Pemerintahan Kelurahan**

No	Jabatan	Nama	Ket
1	LURAH- SEKERTARIS	Susia Wati. SH	
2	KASI PEMERINTAHAN	Ernawati. SH	
3	KASI TRANTIB	Hendro Rudianto. SH	
3	STAF	Andika	
5	SATPOL PP	Agestia wati	

Sumber: lurah penengahan Ibu Susia Wati. SH

Dan dalam melaksanakan tugas pelayanan kemasyarakatan lainnya Lurah dibantu oleh Pamong Kelurahan dan Kepala Lingkungan dan Ketua RT<sup>1</sup>

## **F. Gambaran Umum Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Plat Nomor**

Plat nomor adalah plat yang yang terbuat dari alumunium sebagai tanda kendaran bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada kantor SAMSAT didaerah masing-masing dan berfungsi sebagai bukti atau syarat pengoprasian kendaraan bermotor.

### **2. Macam-macam Warna Plat Nomor**

- a. Kendaraan bermotor pribadi dan sewa berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
- b. Kendaraan bermotor umum atau angkutan barang berwarna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
- c. Kendaraan bermotor milik pemerintah berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih

### **3. Plat Nomor Sejenis TNKB**

Salah satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yaitu pada sudut kanan bawah terdapat tanda khusus cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi kanan dan kiri ada tanda khusus cetak dengan tulisan KORLANTAS POLRI yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri. Dengan spesifikasi ukuran plat nomor untuk kendaraan roda 2 dan 3 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih

---

<sup>1</sup>Data Monografi Desa, Kelurahan Penengahan 2013

adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm dan bahan yang digunakan plat nomor adalah alumunium atau bahan lainnya dengan spesifikasi yang diterbitkan Polri. Sedangkan plat nomor yang tidak ada logo kepolisian dan apabila bahan, bentuk, ukuran dirubah dengan tidak sesuai ketentuan samsat maka plat nomot tersebut tidak sah.

#### **4. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**

Menurut penjelasan Bripka Erik Triwibowo undang-undang tanda nomor kendaraan bermotor yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jelas sudah diterapkan, karena tugas kepolisian itu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, kenyamanan, ketertiban dan lalu lintas dijalan. Pihak kepolisian juga sudah sering melakukan kegiatan razia atau pemeriksaan terhadap para pengendata bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan samsat, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor yang tidak sah.<sup>2</sup>

#### **G. Praktek Jual Beli Plat Nomor Palsu di Kelurahan Penengahan**

Kelurahan penengahan adalah kelurahan yang terletak di Kota Bandar Lampung, karena memiliki letak yang cukup strategis pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga lumayan maju di bandingkan dengan desa-desa sekitar. Apalagi sejak lama sudah berdiri Rumah

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Bripka Erik Triwisbowo, kepala bagian pembuatan plat nomor kendaraan bermotor, pada tanggal 8 Oktober 2017

Sakit dan tidak terlalu jauh dari Kelurahan Penengahan juga berdiri Mall yang sangat membantu perekonomian masyarakat Kelurahan Penengahan. Dengan demikian banyak dari penduduk Kelurahan Penengahan yang bekerja di Rumah Sakit dan Mall tersebut. Selain itu juga penduduk bekerja sebagai pedagang di pasar ataupun pedagang dikaki lima, sehingga secara umum perkembangan ekonomi Kelurahan Penengahan lebih cepat dari Kelurahan lainnya.

Pada era 80-an sampai 90-an penduduk kelurahan penengahan sudah banyak yang memakai sepeda motor dan kendaraan roda 4 sebagai alat transportasi, terutama bagi mereka yang bekerja di Rumah Sakit ataupun pegawai Mall dan juga para pedagang. Sehingga plat motor yang mereka gunakan pada kendaraan bermotor banyak yang mengalami kerusakan karena terbentur atau saat membawa barang dagangannya. Sehingga kerusakan pada plat nomor bukan hal yang asing lagi. Sehingga banyak penduduk dan pedagang yang mengganti plat nomornya menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan Samsat.

Disinilah peluang yang dapat menjanjikan dan membantu perekonomian keluarga, jika sedang ramai seminggu bisa mendapat 4-5 pemesan pembuat plat kendaraan bermotor palsu, sehingga membuat saya tertarik untuk membuka tempat pembuatan plat nomor kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

Faktor-faktor yang mendukung berdirinya toko pembuatan plat yaitu:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto pedagang plat, pada tanggal 10 Oktober 2017



## 1. Pihak Pedagang

- a. Karena adanya peluang dan untuk menafkahi keluarga hal ini cukup menjanjikan bagi pihak penjual, dengan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu juga tidak perlu pelatihan dengan biaya yang mahal untuk mahir membuat plat kendaraan bermotor, hanya cukup dengan belajar dengan sesama rekan penjual plat.

Sistem penjualan pun sederhana dikarenakan tempat penjualan sangat strategis karena dekat pusat grosir banbu kuning, pasar bawah, pasar tengah yang cukup ramai, hanya dengan memasang pernik pernik plat kendaraan pembeli akan datang sendiri. Peralatan yang digunakan juga cukup sederhana, tidak mesti dengan mesin tertentu hanya dengan menggunakan palu, mal angka, cat, lis pinggir yang terbuat dari besi dan pembuatannya pun masih menggunakan cara manual.<sup>4</sup>

- b. Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli plat yang dekat dan murah. Selain itu hal ini juga dirasa cukup membantu masyarakat dikarenakan lamanya waktu tunggu plat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian antara 8-12 bulan, hal ini yang menjadi alasan terbesar bagi masyarakat untuk memakai jasa pembuatan plat motor palsu. Selain itu jika plat mengalami kerusakan sehingga plat kendaraan tidak terlihat atau terbaca lagi hal ini dikarenakan rusak, patah, nomor tidak terbaca atau terkelupas, warna yang sudah buram, atau lusuh, dan ataupun hilang.

---

<sup>4</sup>*Wawancara* dengan Bapak Agus Gunawanpedagang plat, tanggal 11 Oktober 2017

- c. Pedagang tidak mempunyai itikad jahat untuk sekedar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya artinya tidak ada motif lain dari pihak pedagang, motif ekonomi merupakan hal utama, dimana pedagang melihat peluang ekonomi dari lamanya plat tanda kendaraan bermotor resmi keluar dari pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.
- d. Melihat keberadaan toko yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.
- e. Adanya link dan jaringan antar pedagang, sehingga mempermudah adanya timbal balik penjual dan apabila kekurangan maka mengambil dari toko lain.
- f. Apabila jual beli plat ini dijalankan dengan teliti dan fropesional, maka kerugian jarang terjadi<sup>5</sup>
- g. Pihak konsumen atau pembeli
  - 1) Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena saling percaya yang tinggi.
  - 2) Prosesnya lebih cepat dan mudah.
  - 3) Keberadaan toko yang dekat.<sup>6</sup>

Hal lain yang menjadi faktor berkembangnya praktik jual beli plat kendaraan palsu ini, belum adanya tindakan hukum oleh pihak yang berwajib. Sehingga seolah menjadi alasan bagi pihak penjual untuk terus menjalankan bisnis jua beli plat kendaraan palsu tersebut.

Faktor utama yang menjadikan usaha ini semakin berkembang yaitu mudahnya proses transaksi serta waktu yang cepat dalam membuat plat motor palsu

---

<sup>5</sup>*Wawancara* dengan Bapak Sugeng Priyono pedagang plat, tanggal 10 Oktober 2017

<sup>6</sup>*Wawancara* dengan sodara Endi Ezis pembeli plat nomor kendaraan palsu, tanggal 17 oktober 2017

ini. Hanya cukup dengan menunjukan nomor surat kendaraan bermotor yang asli, maka pihak menjual akan membuat dengan spesifikasi yang diinginkan setelah beberapa hari plat kendaraan berotor jadi.

Pihak pembeli pun sebenarnya tau hal ini merupakan pelanggaran, namun ia berdalih justru pegawai samsat yang menyarankan sementara plat kendaraan yang resmi belum keluar bisa membuat plat yang palsu untuk kemudahan berkendara dijalanan, namun dengan syarat harus sesuai dengan STNK asli.<sup>7</sup>

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli plat palsu

di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli plat palsu yaitu

#### 1. Cara memperoleh bahan-bahan

Dalam memperoleh bahan untuk membuat plat nomor palsu seperti plat aluminium dan cat semprot cukup mudah untuk mendapatkannya di toko-toko bangunan pun banyak di jual. Selain itu, sesama penjual plat nomor palsu juga banyak melakukan transaksi jika ditoko sedang kehabisan bahan.<sup>8</sup>

#### 2. Cara melaksanakan perjanjian

Praktek penjualan plat nomor kendaraan palsu di Kelurahan Penengahan ini dapat dilakukan dengan cara kash dan dp (membayar setengah dahulu), dengan menggunakan akad tertulis terkadang ada juga dengan lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan sodari Armelia pembeli plat kendaraan bermotor palsu, Tanggal 15 oktober 2017

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Widarno pedagang plat, tanggal 11 Oktober 2017

kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

### 3. Cara menetapkan harga

Dalam penetapan harga jual plat nomor kendaraan bermotor sudah ada ketentuan harganya, yaitu Rp.40.000, untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp.90.000, untuk kendaraan beroda empat dengan lama pemesanan berkisar 3-4 hari plat sudah bias diambil.<sup>10</sup>

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli plat nomor kendaraan palsu.

#### 1. Ijab qabul dalam jual beli kendaraan bermotor palsu

##### a. Bentuk kata-kata yg digunakan

Pelaksanaan jual beli yang diterapkan pada toko jual beli kendaraan bermotor palsu tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, konsumen akan datang dan memesan plat kendaraan bermotor palsu dan menanyakan harganya lalu penjual pun menyarankan untuk melihat contoh terlebih dahulu sambil menanyakan STNK sebagai syarat untuk pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Eko Saptono pedagang plat, tanggal 11 October 2017

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Juli pedagan plat, tanggal 12 October 2017

<sup>11</sup>Wawancara, dengan Bapak Dwi JP pedagang plat, tanggal 12 October 2017

Menurut pengamat penulis, transaksi jual beli pada toko jual beli plat kendaraan bermotor palsudilaksanakan secara tertulis. Namun tak jarang ada juga yg hanya menggunakan perjanjian secara lisan karena sudah saling percaya. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam bertransaksi sudah sangat jelas sehingga dapat dimengerti konsumen.

Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut sudah sah menurut hukum Islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli.

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adanya kesepakatan dalam pembayaran dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu: suatu tindakan

hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut peneliti, toko penjual plat nomor kendaraan palsu tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi transaksi jual beli penjual tidak memaksa untuk membeli plat kendaraan bermotor palsu. Konsumen dibebaskan untuk melihat-lihat dulu contoh dan begitu pula dalam hal penawaran harga yang sudah ditetapkan kendaraan beroda 4 dihargai Rp.90.000, dan roda dua dihargai Rp.40.000, saat itulah terjadi ijab dan qabul jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu.

## 2. Objek dan pembayaran jual beli

Objek jual beli yang ada di toko penjualan plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung adalah jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu dan alat pembayarannya adalah berupa uang, bisa membayar secara tunai dan dp (membayar setengah dahulu) sebagai uang muka pembelian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Wawancara*, dengan sodara Didi Iskandar pembeli plat nomor kendaraan palsu, tanggal 18 October 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu**

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat, begitu pula bagi para penjual plat nomor kendaraan di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung. Jual beli tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, dilihat dari data uang telah dikumpulkan bahwa warga Kelurahan Penengahan cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan dan jasa.

Pada dasarnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Kelurahan Penengahan ini sudah cukup baik. Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditelaah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan, jika diamati jual beli ini sama dengan jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan masih ada kekurangan yang kiranya perlu dibahas agar permasalahan ini jelas.



Pada praktiknya pembeli datang dan memesan untuk dibuatkan plat kendaraan bermotor yang sesuai dengan surat-surat kendaraan bermotor resmi. hal ini dikarenakan lamanya waktu plat asli dari pihak kepolisian keluar bisa sampai 8-10 bulan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung**

Dalam pandangan Islam praktik jual beli plat kendaraan bermotor termasuk jual beli yang dibolehkan yaitu suatu akad timbal balik jual beli kemanafatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..

Ayat di atas membahas tentang kebolehan transaksi jual beli, dan mengharamkan riba. Pada praktik jual beli plat kendaraan bermotor palsu termasuk jual beli yang dibolehkan hal yang masih menjadi sorotan, ditinjau dari dzatnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor ini bukan merupakan barang yang haram dan najis sehingga dalam pandangan Islam pun tidak dilarang. Namun, dalam Islam melarang jual beli yang mengandung penipuan dan pemalsuan, karena yang sebenarnya berhak mengeluarkan/membuat plat kendaraan bermotor ini adalah SAMSAT atau pihak kepolisian.

Analisis praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli dalam pandangan hukum Islam:

## 1. Pelaku Jual Beli

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli plat nomor, dalam melaksanakan jual beli plat nomor ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum islam, yaitu:

### a. Baligh

Menurut hukum islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli plat nomor ini, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Baligh dalam aturan islam yaitu

### b. Beragama Islam

Dalam pelaksanaan jual beli plat ini mayoritas pelakunya beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Walaupun dalam Islam jual beli tidak harus disyaratkan dengan sesama muslim saja.

### c. Dengan Kehendak Sendiri

Menurut hukum Islam diantara syarat yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaannya jual beli plat nomor dilakukan dengan kehendak sendiridan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29-30 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
 فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا



Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

#### d. Keduanya Tidak Mubadzir

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak cakap bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

## 2. Objek/Barang

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma'qud ala'ih/barang yang diperjual belikan. Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu objeknya yaitu plat nomor, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

### a. Suci

Objek dalam jual beli ini adalah plat nomor yaitu barang yang tentu suci bukan barang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### b. Memberi manfaat menurut hukum syara'/tidak terlarang

Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara'. Jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### c. Barang itu ada

Dalam pelaksanaan jual beli plat ini sudah tentu barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam dalam tentang syarat objek jual beli ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

### d. Dapat diserahkan

Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan

hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

e. Milik sendiri

Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor ini sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

f. Diketahui (dilihat) jenis, ukuran dan takaran

Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Pelaksanaan jual beli plat di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung, mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya.

Selain itu plat yang dipesan merupakan nomor plat resmi yang sesuai dengan surat-surat kendaraan, hal ini bukan untuk penipuan yang bermaksud untuk tindak kejahatan. Hal ini justru untuk menciptakan kenyamanan pengendara.

3. Ijab Qabul

Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam jual beli plat nomor ini ijab qabul sudah terpenuhi maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya semua syarat dan rukun akad jual beli terpenuhi, tidak adanya kecacatan baik dari segi proses maupun pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini ialah pendekatan *Maqosidus Syariah* yaitu Maslahat bagi umat. Pada dasarnya sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan, yaitu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menghilangkan mafsadat/keburukan bagi umat. Pada praktik jual beli plat kendaraan palsu menurut penulis dirasa banyak membawa manfaat bagi semua pihak baik pembeli maupun penjual, yaitu:

- a. Alasan yang dibenarkan dalam membuat plat kendaraan motor palsu ialah jika plat yang asli rusak, sehingga nomor yang tercantum tidak terbaca jelas, patah akibat kecelakaan atau hilang maka hal ini dibenarkan untuk kenyamanan di dalam perjalanan.
- b. Lamanya masa tunggu plat kendaraan yang dikeluarkan oleh SAMSAT terkadang hingga 8 bulan bahkan 10 bulan, hal ini membuat masyarakat menjadi resah ketika berkendara, seperti lebih sering di stop oleh pihak kepolisian karena dianggap motor bodong atau karena dianggap melanggar peraturan pemerintah tentang kewajiban menggunakan plat kendaraan ketika berkendara di jalan raya sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk tidak membuat plat kendaraan bermotor palsu.
- c. Pihak SAMSAT yang bernama BRIPKA Erik Triwibowo selaku ketua bagian pada pembuatan plat menyarankan agar membuat plat palsu sembari menunggu plat yang asli jadi. Hal ini menjadi legitimasi baik bagi masyarakat maupun bagi penjual untuk melakukan transaksi jual beli ini.
- d. Bagi penjual jelas ini menjadi ladang pekerjaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik jual beli plat kendaraan palsu berkembang dengan cukup baik, seiring dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru. Dalam bisnis Islam dapat

diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi jenisnya), namun dibatasi dalam cara perolehan dan peberdayaan hartanya (ada aturan halal dan harganya). Sesuai dengan firman Allah, surat An-nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Konsep diatas menjeaskan bahwa dalam meperoleh harta harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat dengan jalan perniagaan yang seksama suka diantara kamu agar tidak saling merugikan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi hak-hak orang lain dengan menghindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli plat motor palsu adalah yang diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur-unsur yang dapat merugikan. Hal lainnya ialah tercapainya tujuan syariat yaitu kemanfaatan bagi semua pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melampirkan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik beberapa kesimpulan, tentang jual beli plat kendaraan bermotor palsu:

1. Pelaksanaan akad transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan dikios tempat pembuatan plat nomor tersebut. Unsur atau syarat-syarat jual beli sudah bisa dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam jual beli plat nomor sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam. Mereka sudah masuk dalam kategori baligh. Selain dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses transaksi jual beli. Objek jual beli adalah plat nomor berupa aluminium, secara hukum Islam objek yang dijadikan akad ini sudah memenuhi syarat jual beli, yakni suci barangnya, bermanfaat, dan dapat diserahkan, milik sipenjual dan bisa diketahui keadaannya. Ijab qobul antara kedua belah pihak lebih banyak menggunakan “bahasa pasar” atau bahasa non formal tetapi mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. Jual beli plat nomor palsu yang diperbolehkan oleh pihak kepolisian dengan persyaratan adanya stnk yang asli sesuai dengan nomor kendaraan bermotor dan dalam hukum Islam diperbolehkan hal ini dikarenakan terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan jauh dari unsur yang dapat merugikan.

2. Praktek Jual beli plat nomor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Proses jual beli ini diperbolehkan dengan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Selain objek itu sendiri bukan merupakan najis dan diharamkan oleh Islam, jual beli disini mengandung unsur kemanfaatan. Penjual telah membantu pembeli untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang lalu lintas, yakni ketiadaan plat nomor dalam kendaraan. Jual beli plat nomor yang dilarang yaitu larangan ini diberlakukan atas jual beli plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur pemalsuan, namun haram disebabkan oleh barang atau zatnya yang haram, tetapi keharamannya disebabkan oleh adanya sebab lain yang menjadi haram.

## **B. Saran**

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Kelurahan Penengahan kota Bandar Lampung masih menyisakan beberapa catatan penting, terutama demi tegaknya aturan yang berlaku dalam Undang-Undang berlalu lintas. Disisi lain, secara hukum Islam proses jual beli ini patut mendapatkan perhatian.

1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuatan TNKB di SAMSAT juga harusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu dipertimbangkan kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usahadibidang pembuatan plat nomor.
2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta Undang-Undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani

pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.

3. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarat, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta, Widjaya Djakarta, 1969.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Darul-Falah, Jakarta, 1992.
- Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
- Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Amam, Jakarta, 2003. Wahab
- Abdurahman Al-Jazairi, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazhabib al-arba'ah*, Juz 3, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad, bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Jilid I, No. Hadits 2015, Dahlan, Bandung, tt.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarat, 2010.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarata, 1995.

Al Husaini, Imam Taqiyuddin, Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, CV. Bina Iman, Surabaya, 1995.

C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, SinarGrafika, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Terjemahan*, CV Diponogoro, Bandung, 2010.

Dimayyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-3, Yayasan Nurul Islam.

H.M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV*, Dar al-Kutub al-ilmiyah, Libanon, 1993.

Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah (KlasikKotemporer)*, Graham Indonesia, Bogor, 2012.

Ja'far, Khumaedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan bisnis*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung , Bandar Lampung, 2015.

Jurnal Al'Adalah Jurnal Hukum dan Kebudayaan Islam (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Al'Adalah No.1-2 Edisi Januari-

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rudas Karya, 2000.

- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2013.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, Cet 2.
- Moh, Nazir., *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Pabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Bisnis Riset*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1, Ayat 10.
- Poerwadinata, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III, Alma'arif, Bandung, 1987.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003.
- Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan 5, PustakaSetia, Jakarta, 2015.
- Syaripudin, Amir, *Usul Fiqih Jilid 1*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung: Pusat, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terjemah Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12, Cetakan Ke-10, Alma' Arif, Bandung, 1996

Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, Gema Insani, Jakarta, 2005.

Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.

Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Dar Al-Fikr, Beirut, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung, CV. Diponogoro, 1983.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1997.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.